

ABSTRAK

Moch Diaz Irvansyah, 1173030053 *“Implementasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tata Ruang Di Kota Cimahi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Perspektif Siyasah Dusturiyah”*

Dalam suatu tata ruang, selalu ada kawasan lindung, kawasan pertanian, kawasan industri, pedesaan, perkotaan dan pusat pelayanan sebagai suatu sistem. Kawasan resapan air merupakan penting karena kawasan ini berfungsi meresapkan air hujan dan dapat mencegah terjadinya banjir dan longsor. Namun saat ini didapati banyak pembangunan perumahan pada kawasan tersebut. Alih fungsi lahan tersebut mempengaruhi kawasan resapan air yang berfungsi sebagai penyeimbang kawasan lain.

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan implementasi dari Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi. Penelitian ini juga membahas mengenai kendala, faktor pendukung, faktor penghambat dari pelaksanaan Perda tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Perda tersebut. Penelitian ini juga membahas pelaksanaan Perda dari perspektif Siyasah Dusturiyah.

Secara hierarki, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kota Cimahi sebagai Kota Inti dari Pusat Kegiatan Nasional Cekungan Bandung yang aman, nyaman, efisien dan berkelanjutan dengan meningkatkan fungsi kota sebagai pusat jasa dan perdagangan serta pusat industri kreatif yang berbasis telematika.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Perda Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 belum maksimal. Penyebabnya adalah pertumbuhan kota yang pesat menyebabkan Perda tersebut perlu dikaji kembali atau bila perlu dilakukan revisi. Kendala dalam penerapan Perda tersebut khususnya pada kawasan resapan air adalah masih terdapat pembangunan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan melebihi dari Koefisien Dasar Bangunan yang telah ditentukan. Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi berupaya untuk mempertahankan kawasan resapan air supaya tidak semakin tergerus dengan melakukan pengendalian pembangunan melalui Koefisien Dasar Bangunan. Dalam Siyasah Dusturiyah, kebijakan pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan umat. Maka hendaknya pemerintah membuat peraturan yang dapat menciptakan maslahat bagi masyarakat dan berlaku tegas atas peraturan yang telah ditetapkan agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, bersih, dan teratur.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, RTRW, Siyasah Dusturiyah